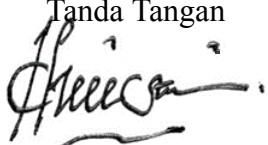
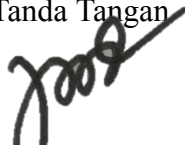
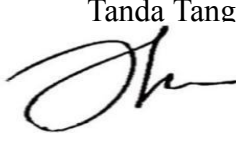




UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH		KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi		1421222	MK Inti Prodi	2 SKS	6	02 Agustus 2023
Otorisasi		Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ka. PRODI
		Tanda Tangan  (Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H.,M.H)		Tanda Tangan  (Dra. Jundani S.H.,M.Hum)		Tanda Tangan  (Dr. Musleh Herry S.H.,M.Hum)
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL - PRODI					
	CPL.02 S	Berperan dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berjiwa Pancasila, nasionalis, taat hukum, empati, semangat kemandirian dan kewirausahaan.				
	CPL.03 S	Menginternalisasikan nilai, norma, etika akademik dan menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya.				
	CPL.07 KK	Mampu mengimplementasikan hukum tata negara melalui penguasaan keterampilan tata beracara menurut hukum formal untuk melakukan pemecahan masalah.				
	CPL.11 P	Menguasai konsep teoritis dasar-dasar ilmu hukum yang meliputi hukum privat dan hukum publik serta dasar teoritis keilmuan hukum materiil dan hukum formil secara mendalam				
	CP – MK					
	CPMK1	Menjelaskan sejarah, asal usul, istilah, pengertian, urgensi hukum konstitusi				
	CPMK2	Menerangkan pengaruh konfigurasi politik dan lembaga negara pelaku politik hukum, dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum (kaca mata Islam dan kontemporer).				

	CPMK3	Menganalisis urgensi pengujian peraturan perundang-undangan sebagai instrumen politik hukum (Islam dan kontemporer).
	CPMK4	Berpartisipasi dalam penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mengimplementasikan konsep Masalah Mursalah.
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konsitusi, memiliki dua unsur yang saling menunjang satu sama lainnya, yaitu unsur teoritis yang bertujuan untuk memberikan pengayaan kognitif bagi mahasiswa, dan unsur aplikatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara praktis bagi mahasiswa. Mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami teknik dan mekanisme formil dan materiil Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi. Secara teoritis dan prakteknya diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan kemahiran ilmu hukum Islam, hukum positif berupa kemampuan dan kecakapan dalam mekanisme prosedur dalam beracara di Mahkamah Konstitusi.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1. Mendiskripsikan Urgensi Lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan RI, 2. Mendeskripsikan dan mengidentifikasi Dasar Yuridis & Landasan Teori Mahkamah Konstitusi 3. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: 4. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan Kedudukan, fungsi, kewenangan & syarat hakim konstitusi 5. Mengidentifikasi Karakteristik Hukum Acara MK 6. Mengidentifikasi Aspek-aspek umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 7. Mengidentifikasi dan menganalisis Metode Penafsiran Konsitusi 8. Mendeskripsikan dan menganalisis Judicial review undang-undang: 9. Mendeskripsikan dan menganalisis Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (SKLN): 10. Mendeskripsikan dan menganalisis Sengketa Pembubaran Partai Politik 11. Mendeskripsikan dan Menganalisis Sidang Putusan Pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan atau wakil presiden 12. Mendeskripsikan dan menganalisis metode Model MK di beberapa Negara : 13. Mendeskripsikan dan menganalisis Mahkamah Konstitusi dari Ius Constitutum Ke Ius Konstituendum	
Pustaka	Utama :	
		1. Tim Penyusun, <i>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</i> , Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010
	Pendukung :	
		1. Abdul Mukthie Fadjar, <i>Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi</i> , Jakarta: Setjen Kepaniteraan MK RI, 2007

	2. Hamdan Zoelva, <i>Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945</i>, Jakarta; Konpress. 2005 3. Jimly Asshiddiqie, <i>Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945</i>, Jakarta; FH-UI Press. 2004 4. Jimly Asshiddiqie, <i>Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara</i>, Jakarta; Konpress. 2005 5. Jimly Asshiddiqie, <i>Hukum Acara Pengujian Undang-Undang</i>, Jakarta; Konpress, 2006 6. Jimly Asshiddiqie, <i>Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi</i>, Jakarta: Setjen Kepaniteraan MK RI, 2006 7. Jimmly Asshiddiqie, <i>Sengketa Kewenangan Konsitusional Lembaga Negara</i>, Jakarta Setjen Kepaniteraan MK RI, 2005 8. Mahkamah Konstitusi RI, <i>Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern Terpercaya</i>, Jakarta: Setjen Kepaniteraan MK RI, 2004 9. Mauarar Siahaan, <i>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</i>, Jakarta; Konpress. 2005 10. Muchamad Ali Safa'at, Widodo E., Fatmawati, dan Saifuddin, <i>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</i>, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010 11. Refli Harun Dkk, (ed) <i>Refleksi Satu Tahun MK: Menjaga Denytut Konstitusi</i>, Jakarta KonPress, 2004 12. Rita Triana Budiarti, <i>On The Record Mahfud MD Di Balik Putusan MK</i>, Jakarta KonPress, 2010 13. Masdar Farid Mas'udi, <i>Syarat Konstitusi</i>, Jakarta Alvabet, 2010 14. Bambang Sutyoso, <i>Hukum Acara MK RI</i>, Bandung Citra Aditya Bakti, 2006 15. Abdul Latif, <i>Fungsi MK dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi</i>, Yogyakarta Total Media, 2007 16. Moh. Mahfud MD, Jazim Hamidi, I Dewa Gede Paguna, Muchammad Ali Syafa'at, Mustafa Lutfi, <i>Constitutional Question Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional</i>, Malang UB Press 2010 17. Mustafa Lutfi, <i>Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia, Gagasan Perluasan Kewenangan MK</i>, Yogyakarta UII Press 2010 18. Mustafa Lutfi, M Iwan Satriawan, <i>Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia</i>, Malang UB Press, 2016	
Media Pembelajaran	Laptop LCD projector, elearning, Zoom, Quizziz	Buku-buku, Jurnal Nasional & Internasional Berreputasi dan Konstitusi di Negara Lain
Team Teaching	Dosen Serumpun	
Matakuliah Syarat	-	

Perte-muan	Kode CPMK	Sub CPMK	Deskripsi Isi/ Materi	Pengalaman Belajar		Sumber Belajar	Penilaian
				Offline	Online		
					Sinkron Asinkron		

1-2	1	1	1. Urgensi Lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan RI, Dasar Yuridis & Landasan Teori ▪ Istilah (Constitution, Grondwet, constitutie) dan Pengertian Konstitusi; ▪ Urgensi Lahirnya MK dalam sistem Ketatanegaraan RI ▪ Dasar yuridis kewenangan MK ▪ Landasan teori kewenangan MK ▪ Pre-Test.	☐ Perkenalan, Kontrak Perkuliahan, RPS, SAP, penilaian dan evaluasi ☐ Mendeskripsikan dan menganalisis Urgensi Lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan RI, Dasar Yuridis & Landasan Teori			Referensi utama: 1 Referensi pendukung: 1,2,3	☐ Lembar observasi diskusi kelompok ☐ Essay test ☐ Artikel Jurnal
3	1,2	2,3	2. Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: ▪ Dinamika Kekuasaan Kehakiman di Indonesia ▪ Pembentukan MK ▪ Kedudukan MK dan sistem ketatanegaraan Indonesia	☐ Mengidentifikasi, menjabarkan, menjelaskan dan menganalisis konsep dasar Mahkamah Konstitusi di Indonesia			Referensi utama: 1 Referensi pendukung: 1,2,3	☐ Lembar observasi diskusi ☐ Essay test ☐ Artikel Jurnal
4	1,2,3	4,5	3. Kedudukan, fungsi, kewenangan & syarat hakim konstitusi ▪ Kedudukan, Fungsi, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI ▪ Syarat & Susunan Hakim Konstitusi ▪ Pengangkatan & Pemberhentian Hakim Konstitusi	☐ Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan seputar kedudukan, fungsi, Wewenang, Susunan Hakim, Pengangkatan	☐ Mengunduh materi sejarah Kedudukan, fungsi, kewenangan & syarat hakim konstitusi		Referensi utama: 1 Referensi pendukung: 1,2,3 PPT,Internet	☐ Hasil analisis ☐ Essay test

			▪ Kode Etik Hakim Konstitusi	& Pemberhentian, Kode etik Hakim Konstitusi	di <i>elarning</i> ☐ Dialog Perihal Kedudukan, fungsi, kewenangan & syarat hakim konstitusi di <i>elarning</i>			
5			4. Karakteristik Hukum Acara MK ▪ Peristilahan dan Pengertian Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ▪ Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ▪ Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ▪ Kekhususan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	☐ Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Karakteristik hukum acara MK	☐ Diskusi Aktif		Referensi utama: 1 Referensi pendukung: 1,2,3 ☐ PPT ☐ Internet	☐ Lembar observasi diskusi
6			5. Aspek-aspek umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ▪ Permohonan dan Permohonan online ▪ Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang ▪ Penggabungan Perkara	☐ Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aspek-aspek umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	☐ Simulasi Sidang semu		Referensi utama: 1 Referensi pendukung: 1,2,3 ☐ PPT ☐ Web MK	☐ Lembar observasi simulasi sidang semu

			▪ Beban Pembuktian dan Alat Bukti : a) surat & tulisan b) keterangan saksi c) keterangan ahli d) keterangan para pihak e) petunjuk f) informasi elektronik ▪ Jenis dan Sifat Persidangan : a) pemeriksaan pendahuluan b) pemeriksaan persidangan c) rapat permusyawaratan hakim d) pengucapan putusan ▪ Persidangan Jarak Jauh ▪ Putusan a) Putusan provisi & putusan akhir b) Ultra petita c) Sifat putusan d) Pengambil putusan e) Isi putusan f) Pendapat berbeda g) Kekuatan hukum putusan ▪ Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan	meliputi: • Permohonan dan Permohonan online • Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang • Penggabungan Perkara • Beban Pembuktian dan Alat Bukti • Jenis dan Sifat Persidangan • Persidangan Jarak Jauh • Putusan • Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan				
7			6. Metode Penafsiran Konsitusi ▪ Penafsiran sebagai Metode Penemuan Hukum ▪ Macam-Macam Penafsiran Hukum dan Konstitusi a) Interpretasi gramatikal	• Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menafsirkan konstitusi	☐ Diskusi		Referensi utama: 1 Referensi pendukung: 1,2,3 ☐ PPT ☐ Internet	☐ Lembar observasi diskusi

			b) Interpretasi teologis/sosiologis c) Interpretasi sistematis/logis d) Interpretasi historis e) Interpretasi komparatif/perbandingan f) Interpretasi futuristis g) Penafsiran tekstual h) Penafsiran Historis/penafsiran originalism i) Penafsiran i doktrinal j) Penafsiran prudensial k) Penafsiran truktural l) Penafsiran etikal ▪ Kebebasan Hakim dalam menggunakan Metode Penafsiran Konstitusi	meliputi Penafsiran sebagai Metode Penemuan Hukum • Macam-Macam Penafsiran Hukum dan Konstitusi • Kebebasan Hakim dalam menggunakan Metode Penafsiran Konstitusi				
8				Ujian Tengah Semester				☐ <i>Easy test</i>

9	2,3,4	5,6	7. Judicial review undang-undang: ▪ Ruang lingkup pengertian undang-undang yang diuji ▪ Pengujian formil dan materiil a) Pengujian formal b) Pengujian materiil ▪ Kedudukan hukum pemohon a) Perorangan warga negara Indonesia b) Kesatuan masyarakat hukum adat c) Badan hukum publik/privat d) Lembaga negara e) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional ▪ Posisi pembentuk undang-undang dalam persidangan ▪ Keterangan tambahan (ad informandum judicem) ▪ Proses persidangan dan pembuktian: a) Proses persidangan : 1) pemeriksaan pendahuluan 2) pemeriksaan persidangan 3) rapat permusyawaratan hakim 4) pengucapan putusan	☐ Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur Materi muatan konstitusi	☐	Referensi utama: 1 Referensi pendukung: 1,2,3 ☐ PPT ☐ Web MK	☐ Pengamatan ☐ Simulasi sidang semu
---	-------	-----	--	---	--------------------------	---	--

			b) Pembuktian ▪ Putusan : ▪ Jenis putusan ▪ Isi putusan a) Amar putusan : b) Ditolak c) tidak dapat diterima d) Dikabulkan e) Perkembangan putusan MK: 1) Konstitusional bersyarat 2) Tidak konstitusional 3) Penundaan keberlakuan putusan 4) Perumusan norma dalam putusan					
10	2,3,4	6,7,8	8. Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (SKLN): ▪ Pengertian lembaga negara ▪ Hukum Acara SKLN ▪ Pihak-Pihak yang Bersengketa: a) Pemohon b) Termohon c) Kemungkinan MA sebagai pihak dalam perkara SKLN ▪ Permohonan dan Tata cara pengajuannya	☐ Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur tentang Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (SKLN): Pengertian lembaga negara, Hukum Acara SKLN,			Referensi utama: 1 Referensi pendukung: 1,2,3 ☐ PPT ☐ Web MK	☐ Pengamatan ☐ Sidang semu

			▪ Pemeriksaan Administrasi dan Registrasi ▪ Penjadwalan dan Panggilan Sidang ▪ Pemeriksaan Perkara : a) pemeriksaan pendahuluan b) pemeriksaan persidangan c) pembuktian d) penarikan kembali permohonan ▪ Rapat Permusyawaratan Hakim ▪ Putusan	Pihak-Pihak yang Bersengketa, Permohonan dan Tata cara pengajuannya, Pemeriksaan Administrasi dan Registrasi, Penjadwalan dan Panggilan Sidang, Pemeriksaan Perkara				
11	2,3,4	6,7,8	9. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU): ▪ Latar belakang/perselisihan hasil pemilu ▪ Permasalahan Perselisihan Hasil Pemilu di Indonesia ▪ Penyelesaian PHPU Sebagai Sengketa Konstitusionalitas Pemilu ▪ Macam-Macam Perselisihan Hasil Pemilu ▪ Hukum Acara PHPU : a) Isi Permohonan b) Para pihak (pemohon, Termohon & turut termohon, pihak terkait) c) Obyek Permohonan d) Pembuktian dan alat bukti	☐ Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi tentang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)			Referensi utama: 1 Referensi pendukung: 1,2,3 ☐ PPT ☐ Web MK	☐ Pengamatan ☐ Sidang semu

			e) Tenggang waktu pengajuan f) permohonan dan tenggang waktu g) putusan h) Proses Persidangan dan Pembuktian i) Putusan MK dan Pelaksanaannya					
12			10. Sengketa Pembubaran Partai Politik berupa: ▪ Pengertian Pembubaran dan wewenang Pembubaran Partai Politik di Indonesia ▪ Membaca amandemen UUD 1945 ▪ Mekanisme pembubaran partai politik ▪ Pemohon dan Permohonan ▪ Partai Politik yang dimohonkan sebagai Termohon ▪ Alasan-alasan Pembubaran Partai politik ▪ Proses Persidangan dan Pembuktian ▪ Putusan dan Akibat Hukum Putusan secara teori ▪ Analisis umum putusan MK ▪ Analisis Implementasi putusan MK terhadap penyelesaian sengketa hasil pililukada	☐ Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pembubaran partai politik			Referensi utama: 1 Referensi pendukung: 1,2,3 ☐ PPT ☐ Web MK	☐ Pengamatan Sidang semu

13			11. Sidang Putusan Pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan atau wakil presiden, meliputi: ▪ Pemberhentian Presiden sebelum perubahan UUD 1945 ▪ Pengaturan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasca perubahan UUD 1945 ▪ Para pihak: a) Pemohon b) Presiden dan/atau Wakil Presiden ▪ Alasan Permohonan ▪ Permohonan ▪ Cara Pengajuannya ▪ Proses Persidangan/ Mekanisme ▪ Memutus	☐ Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan : Prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi berupa Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan atau Wakil Presiden			Referensi utama: 1 Referensi pendukung: 1,2,3 ☐ PPT ☐ Web MK	☐ Pengamatan Sidang semu
14			12. Model MK di beberapa Negara : ▪ Mahkamah Agung Amerika Serikat ▪ Mahkamah konsitusi di Jerman ▪ Dewan konstitusi Perancis ▪ Mahkamah konstitusi Austria	☐ Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan model MK di beberapa negara menurut sistem ketatanegaraan masing-masing			Referensi utama: 1 Referensi pendukung: 1,2,3 ☐ PPT ☐ Internet	Lembar observasi diskusi
15			13. Mahkamah Konstitusi dari Ius Constitutum Ke Ius Konstituendum	☐ Mahasiswa mampu memahami dan			Referensi utama: 1 Referensi pendukung:	Lembar observasi diskusi

			▪ Pengertian Ius Constitutum & Ius Constituendum ▪ Pembatasan & Perluasan Kekuasaan ▪ Kewenangan Interpretasi Konstitusi ▪ Pengaduan Konstitusional	menjelaskan tentang : Pengertian Ius Constitutum & Ius Constituendum, Pembatasan & Perluasan Kekuasaan, Kewenangan Interpretasi Konstitusi dan Pengaduan Konstitusional			1,2,3 ☐ PPT ☐ Internet	
16			UAS					

Catatan:

- 1) TM : Tatap muka, BT: Belajar Terstruktur, BM : Belajar Mandiri;
- 2) TM : 50 menit/sks/minggu. Contoh **TM: 1x(1x50")**] dibaca: kuliah tatap muka 1 kali (minggu) x 1 sks x 50 menit = 50 menit;
- 3) BT : 50 menit/sks/minggu.
BM : 60 menit/sks/minggu.
Contoh **[BT+BM: (1x1)x(1x60")**] dibaca: belajar terstruktur 1 kali (minggu) dan belajar mandiri 1 kali (minggu) x 1 sks x 60 menit = 60 menit;
- 4) RPS: Rencana PEmbelajarn Semester, CPL: capaian pembelajaran Lulusan, CPMK: Capaian pembelajaran Mata kuliah, RMK: Rumpun Mata Kuliah, PRODI: Program Studi.